

Judul : Dana Kelurahan Siap Digelontorkan Awal Tahun
Tanggal : Minggu, 04 November 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

Dana Kelurahan Siap Digelontorkan Awal Tahun

JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta pencairan dana kelurahan dipercepat. Menurut dia, dana yang sejak lama diusulkan oleh para wali kota itu akan membantu mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia, kemiskinan, dan mengatasi persoalan lapangan pekerjaan. "Saya minta Menteri Keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga segera bisa dimanfaatkan," kata dia di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Jokowi menuturkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menganggarkan dana kelurahan untuk 2019. Realisasi penyalurannya, kata dia, bergantung pada persetujuan DPR atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Dia mengatakan, jika DPR sepakat, dasar hukum yang akan digunakan pemerintah adalah Undang-Undang APBN 2019.

Kemarin, Jokowi mengajak sejumlah menteri kabinetnya menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat khusus diagendakan untuk membahas dana desa dan kelurahan. Meski akan dipercepat pencairannya, kata dia, penyaluran dana senilai Rp 3 triliun itu harus tetap diawasi. "Agar pemanfaatan dana kelurahan menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan," kata dia, meminta Menteri Dalam Negeri menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, berujar dana tersebut segera disalurkan tahun depan. "Pada 1 Januari nanti," kata dia. Dia mengatakan dana senilai Rp 3 triliun itu akan digelontorkan ke 8.122 kelurahan di Indonesia. Adapun mekanisme penyalurannya adalah melalui dana alokasi umum yang dianggarkan pada APBN 2019, tanpa mengganti anggaran kelurahan yang telah dialokasikan oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah akan mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, sedang, dan tertinggal. Nantinya dana itu bakal dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana, terutama untuk kelurahan yang masih tertinggal. "Sehingga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan, seperti dana desa," kata Sri.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Nizar Zahro, sebelumnya menolak pengalokasian dana kelurahan tersebut. Menurut dia, dana kelurahan tak memiliki aturan jelas seperti dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. "Dana kelurahan itu tidak ada di undang-undang, maka batal demi hukum walaupun diusulkan," tutur dia.

● FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI P. |
DANANG FIRMANTO